



► **PENANGANAN COVID-19**

Mobilitas di DIY Harus Digencet 70%

Ujang Hasanudin, Yosef Leon, & Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Sepekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY tingkat mobilitas warga sudah berkurang. Namun penurunan ini menurut epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, belum cukup. PPKM Darurat, kata dia, akan efektif menurunkan angka penularan Covid-19 jika mengurangi mobilitas warga hingga 70%. Sayangnya, di DIY angka itu masih jauh, karena penurunan mobilitas masih di bawah angka 20%.

Riris mengatakan kunci utama agar bisa menghentikan laju penularan virus Corona adalah seberapa besar penduduk bisa dihentikan mobilitasnya. Menurut dia, virus tidak bisa bergerak dan yang membuat bergerak atau menular adalah pergerakan warga. Cara gampangya adalah sekitar 70% orang berhenti bergerak maka virus akan kesulitan mencari orang yang tak punya imunitas.

"Seharusnya dilakukan sampai penularan di rumah tangga selesai, semakin lama semakin baik, benar-benar memastikan penularan berhenti di rumah. Cuma akan ada masalah dalam kehidupan sosial ekonomi," kata Riris, dalam jumpa pers yang dilakukan secara virtual, Sabtu (10/7).

► Halaman 10

Mobilitas di...

Agar pembatasan mobilitas masyarakat tidak sampai mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi, kata dia, yang bisa digunakan minimal masa dua kali infeksius. "Periode penularan kan 10 hari, kalau 20 hari atau tiga pekan akan secara signifikan menekan penularan karena penularan rumah tangga selesai," ucap dia.

Menurut Riris, pembatasan ketat dalam mengurangi mobilitas cukup ditekan besar-besaran di tiga wilayah, yakni Sleman, Jogja, dan Bantul, karena tiga wilayah itu saling berdekatan dan sangat kuat interaksi di dalamnya. Sementara Gunungkidul dan Kulonprogo sudah terpisah secara geografis. Pemerintah sudah membuat PPKM dengan melakukan restriksi mobilitas, berlangsung selama hampir tiga pekan.

Lebih lanjut Riris juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai pengurangan mobilitas ini memindahkan kerumunan dari satu tempat misalnya dari tempat wisata, tempat kerja, dan tempat rekreasi lainnya ke kerumunan yang lain yang tidak terpantau.

Menurut dia, penyebaran atau arus lalu lintas dan pembatasan tempat wisata, tempat rekreasi dan tempat kerja menjadi tidak bermakna jika tidak bisa menekan orang untuk tinggal di rumah. "Kalau sekarang mobilitas di jalan jauh menurun tapi kemudian penurunan lebih karena efek blokade jalan utama tapi kerumunannya tak berkurang atau berpindah misal tadi awal tempat wisata kemudian pindah ke tempat-tempat tersembunyi di perkampungan itu juga akan sebabkan tidak efektifnya PPKM," ucap Riris.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan diberlakukannya PPKM Darurat intinya untuk mengurangi mobilitas dan orang berkerumun karena kerumunan merupakan salah satu sumber penularan Covid-19.

Ia mengakui PPKM Darurat ini baru bisa menekan angka mobilitas warga sekitar 15%-16% atau masih di bawah 20%. Padahal Gubernur DIY mintanya mobilitas warga bisa berkurang 30%-50% untuk menurunkan angka penularan Covid-19.

Dinas Perhubungan bersama

sejumlah pihak termasuk pemerintah kabupaten dan kota, kepolisian dan TNI, berupaya menyekat sejumlah jalan demi menekan mobilitas.

"PPKM Darurat intinya mengurangi mobilitas dan kerumunan karena kerumunan salah satu sumber penularan Covid-19. Dishub DIY bersama-sama instansi terkait, bicara pengurangan mobilitas juga kerja sama dengan kabupaten dan kota. [Dengan] Polres kami koordinasi terus tiap saat, termasuk memantau tiap hari kaitannya efektivitas dan rekayasa yang dilakukan terkait pembatasan mobilitas," ujar Ni Made.

Menurut Ni Made penyejukan di sejumlah titik di Sleman baru menurunkan mobilitas warga sebesar 33%. Penurunan mobilitas di Sleman termasuk yang tertinggi.

"Dari rekaman CCTV yang terpasang di beberapa persimpangan antrean di Kabupaten Sleman turun 33 persen, Kulonprogo turun 28 persen, Bantul turun 35 persen dan Kota Jogja turun 33 persen. Untuk Gunungkidul belum terlihat karena belum memasang CCTV," katanya.

Kepala Dishub Sleman Arip Pramana mengatakan untuk tahap awal penutupan jalan di Sleman diterapkan di beberapa titik, mulai di persimpangan Janti, Jalan Babarsari, Jalan Gejayan dan Jalan Kaliurang yang semuanya berada dekat Ring Road Utara.

"Kebijakan ini berlaku selama PPKM Darurat dengan tujuan untuk menurunkan mobilitas warga dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kami berharap masyarakat mematuhi Instruksi Bupati Sleman terkait PPKM ini," katanya.

Kapolres AKBP Wachyu Tri Budi S masih mengkaji kemungkinan adanya penambahan titik penyejukan jalan agar mampu menurunkan mobilitas masyarakat hingga 50%. Saat ini pihak kepolisian masih mengkaji titik-titik tambahan penyejukan untuk menekan mobilitas masyarakat.

Tidak hanya itu, kepolisian bersama Dinas Tenaga Kerja juga akan mengawasi penerapan sektor esensial dan kritikal yang dibolehkan untuk beroperasi. "Penerapan WFH/WFO di sektor esensial, non esensial dan kritikal

ini bagaimana? Apakah sudah sesuai? Kalau ada pelanggaran, kami akan tindak sesuai hukum," katanya.

Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, mengatakan penurunan aktivitas di jalan raya hampir terjadi merata. "Jadi kami hitung, kami amati di simpang-simpang. Alhamdulillah kondisinya tinggal 39 persen," jelasnya, Minggu. Penurunan aktivitas ini merupakan imbas dari penutupan sejumlah ruas jalan. Baik secara temporer maupun 24 jam. Penutupan juga terfokus di ruas jalan yang perbatasan dengan Kabupaten Sleman maupun Bantul.

Ia juga memastikan penutupan ruas jalan telah melalui kajian. Tujuannya untuk membatasi aktivitas masyarakat non esensial. Khususnya yang ingin berwisata di wilayah Kota Jogja. Skema penutupan ruas jalan selama 24 jam juga telah berlaku. Mulai dari barat simpang empat Wirobrajan, simpang empat Pingit dari arah utara, kawasan Jetis dari arah utara. Lalu Jalan Margo Utomo selatan Tugu Pal Putih.

Kepala Dinas Perhubungan Bantul, Aris Suharyanta, menyebutkan penurunan mobilitas warga pada akhir pekan ini mencapai 50%.

Pecah Rekor Lagi

Sementara itu, penambahan kasus positif Covid-19 DIY kembali memecahkan rekor. Jumlah kasus positif bertambah 1.895 kasus dan kematian 50 kasus pada Minggu.

Kabag Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan dengan penambahan 1.895 kasus, total kasus positif DIY menjadi 76.263 kasus. Dari penambahan itu tertinggi berasal dari Bantul (595 kasus), disusul Sleman (427), Gunungkidul (334), Kota Jogja (325), dan Kulonprogo (214). "Penambahan kasus sembuh sebanyak 710 kasus, sehingga total sembuh menjadi 55.648 kasus," katanya.

Penambahan pasien sembuh paling banyak berasal dari Bantul (243 kasus), Gunungkidul (201), Sleman (174), Kulonprogo (56), dan Kota Jogja (36). Adapun rata-rata kematian pasien Covid-19 di angka 2,59%. Jumlah kematian harian pada Minggu ada 50 kasus. (Sunartono & Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. BPBD			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005